

PROPOSAL PENERBITAN JURNAL HUKUM ADIGAMA
SEBAGAI TERBITAN BERKALA ILMIAH
VOLUME 3 NOMOR 2 TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Astronot pertama yang menginjakkan kakinya di bulan, Neil Armstrong, berkata bahwa “*research is creating new knowledge*” yang artinya penelitian adalah menciptakan pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang tercipta dari temuan baru¹ tersebut bukan hanya dilakukan di dalam ilmu sains, tetapi berlaku untuk semua ilmu, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Pengetahuan baru yang telah tercipta tersebut akan memiliki pengaruh luas jika pengetahuan baru tersebut dipublikasikan dalam bentuk tulisan ilmiah bidang hukum. Salah satu cara mempublikasikan tulisan ilmiah bidang hukum kepada masyarakat luas adalah dengan menuliskannya pada Terbitan Berkala Ilmiah (TBI) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49/Dikti/Kep/2011.

Jurnal Hukum Adigama sebagai TBI dibuat untuk memwadahi temuan baru dalam penelitian maupun tugas akhir mahasiswa yang diproses bersama dengan pembimbingnya. Hal ini juga sejalan dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 152/E/T/2012 yang salah satunya menyatakan Wajib Publikasi Ilmiah bagi S1². Jurnal ini merupakan jurnal ber-ISBN yang eksklusif untuk mahasiswa S1 Fakultas Hukum Tarumanagara dan pembimbingnya. Jurnal yang dapat diakses pada <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama> ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal Hukum Adigama mencakup tulisan keilmuan dari segala Bidang Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum acara. Pada kesempatan ini, kami mengajukan Proposal Penerbitan Jurnal Hukum Adigama Sebagai Terbitan Berkala Ilmiah Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.

¹ Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49/Dikti/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

² Indonesia, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3

B. Manajemen dan Artikel Terbitan Berkala Ilmiah (TBI) Jurnal Hukum Adigama
Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen TBI dan artikel TBI Terbitan Berkala Ilmiah (TBI) Jurnal Hukum Adigama:

1. Manajemen TBI

a. Nama Terbitan Berkala Ilmiah (TBI)

Nama Terbitan Berkala Ilmiah (TBI) yang akan diterbitkan adalah Jurnal Hukum Adigama.

b. Kelembagaan Penerbit

Kelembagaan penerbit Jurnal Hukum Adigama adalah Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan alamat Sekretariat:

Gedung M, Lantai 2
Jl. S. Parman No. 1
Universitas Tarumanagara
Jakarta – 11440
[T]: (+6221) 5671748, 5604477
[F]: (+6221) 5638336
[E]: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

c. Penyuntingan dan Manajemen Pengelolaan Jurnal Hukum Adigama

Penyuntingan Jurnal Ilmiah Hukum Adigama akan dilakukan oleh Dewan Penyunting sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Dekan FH UNTAR
Ketua Dewan Penyunting : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Penyunting Pelaksana : Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
: Ade Adhari, S.H., M.H.
: Moody Rizqy Syailendra, S.H., M.H.
Staf Administrasi : Katrine Novia

Manajemen Pengelolaan Jurnal Hukum Adigama dilakukan melalui komunikasi via *e-mail* oleh Penyunting Pelaksana (**Petunjuk Penulisan terdapat dalam** <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama>).

d. *Peer Review Process*

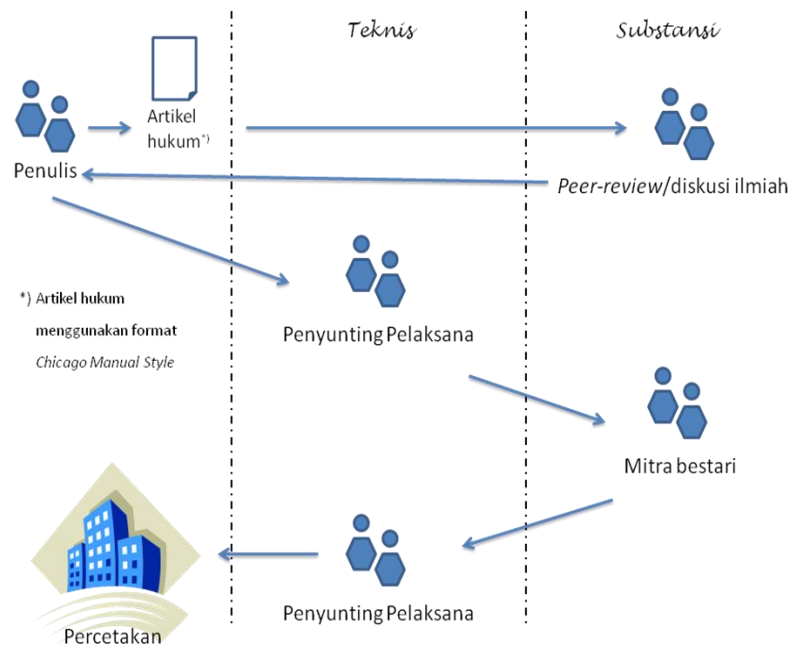
Setiap artikel di-review oleh 1 orang mitra bestari. *Review* jurnal menerapkan sistem *blind review*. Terdapat empat (4) rekomendasi yang dapat diberikan oleh reviewer yaitu:

- 1) *Accept Submission*. Menerima artikel tanpa ada revisi yang diberikan
- 2) *Revision Required*. Memberikan revisi tanpa harus mereviu ulang. Setelah penulis merevisi naskah langsung dilanjutkan ke proses editing.
- 3) *Resubmit for Review*. Memberikan revisi dan setelah penulis merevisi naskah direviu ulang.
- 4) *Decline Submission*. Menolak tulisan karena kualitas tidak memenuhi syarat

Dalam melakukan *review*, *reviewer* mempertimbangkan: *novelty*³, *objectivity*, *method*, *scientific impact*, *conclusion*, and *references*.

e. **Alur Penyuntingan**

Alur penyuntingan setiap artikel hukum yang masuk ke Dewan Redaksi adalah sebagai berikut:



Gambar 1.

Alur penyuntingan artikel hukum untuk Jurnal Era Hukum

³ Andri Gunawan Wibisana, Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur dan Gaya, Andri Gunawan Wibisana, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49 No. 2, hal. 472

f. Keberkalaan

Jurnal Hukum Adigama akan diterbitkan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Juli dan Desember. Penerbitan per volume sebanyak 2 (dua) nomor. Per nomor diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali. Tata cara penulisan halaman berurut dalam 1 (satu) volume; halaman pada nomor 1 (satu) akan berlanjut pada nomor 2 (dua).

g. Penerbitan Jurnal

Penerbitan jurnal dilakukan secara elektronik (*e-journal*) dalam *Archives* pada <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama>.

h. Tampilan

Tampilan jurnal akan dicetak berdasarkan hal-hal berikut ini:

- 1) Jurnal berukuran A4 (210x297mm);
- 2) Tata letak berupa 1 kolom (untuk memberikan ruang yang cukup untuk gambar/tabel/ragaan yang dimuat);

2. Artikel Jurnal

Artikel Jurnal Hukum Adigama memuat substansi artikel dan gaya penulisan dengan karakteristik seperti di bawah ini:

a. Substansi Artikel

Substansi artikel dijaga agar tetap memenuhi standar dari unsur-unsur berikut ini:

1) Cakupan Keilmuan

Cakupan keilmuan mencakup bidang-bidang dalam ilmu hukum

2) Aspirasi Wawasan

Aspirasi wawasan internasional, nasional dan regional

3) Kepioniran Ilmiah

Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah tinggi

4) Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu Hukum

Memberikan makna sumbangan yang nyata bagi kemajuan Ilmu Hukum

5) Dampak Ilmiah

Memberikan dampak ilmiah yang tinggi dengan target sitasi >25.

6) Nisbah Sumber Acuan Primer Sumber Lainnya

Nisbah sumber acuan primer sumber lainnya sebesar > 80%.

7) Derajat Kemutakhiran

Derajat kemutakhiran sebesar > 80%.

8) Analisis dan Sintesis

Level analisis dan sintesis baik. Misalnya mengkolaborasikan dengan cermat dan baik antara peraturan dengan kasus.

9) Penyimpulan dan Perampatan

Penyimpulan dan perampatan baik artinya kesimpulan dibuat sesuai dengan dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan kata-kata yang padat dan jelas.

b. Gaya Penulisan

Substansi artikel dijaga agar tetap memenuhi standar dari unsur-unsur berikut ini:

1) Keefektifan Judul Artikel

Judul artikel lugas dan informatif.

2) Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis

Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis lengkap dan konsisten yaitu memuat nama, afiliasi, alamat institusi dan alamat *e-mail*.

3) Abstrak

Abstrak ditulis secara jelas dan ringkas sebanyak 150-250 kata dalam Bahasa Inggris untuk artikel berbahasa Indonesia dan tetap berbahasa Inggris untuk artikel berbahasa Inggris.

4) Kata Kunci

Mencerminkan konsep penting dalam artikel dan konsisten terdiri atas 5 (lima) kata kunci maksimal.

5) Sistematika Pembaban

Sistem pembaban lengkap dan sistematis mulai dari Pendahuluan, Pembahasan, Penutup dan Daftar Pustaka.

6) Pemanfaatan Instrumen Pendukung

Pemanfaatan gambar/bagan/ragaan bersifat mendukung dan dilengkapi dengan *caption* yang jelas.

7) Cara Pengacuan dan Pengutipan

Baku dan konsisten mengikuti standar *The Chicago Manual Style*.

8) Penyusunan Daftar Pustaka

Baku dan konsisten mengikuti standar *The Chicago Manual Style*.

9) Peristilahan dan Kebahasaan

Berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.

Daftar Pustaka

Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49/Dikti/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

Indonesia, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3

Wibisana, Andri Gunawan. Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur dan Gaya. Andri Gunawan Wibisana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 49 No. 2: 471-496



Jurnal Hukum Adigama

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES
ANNOUNCEMENTS INDEXING

Home > Archives > **Vol 3, No 2 (2020)**

Vol 3, No 2 (2020)

Jurnal Hukum Adigama

Table of Contents

Articles

<u>PENERAPAN ASAS TERANG DAN TUNAI DALAM JUAL BELI TANAH YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2019/PN.LBT)</u> Desvia Winandra, Hanafi Tanawijaya	PDF 1-24
<u>AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PELEPASAN HAK DI BAWAH TANGAN SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 133/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM</u> Jimmy Gunawan, Gunawan Djajaputra	PDF 25-43
<u>TINJAUAN KETEPATAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA MEREK TERHADAP PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR PERTAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 375 K/PDT.SUS-HKI/2020</u> Jessica Candakentjana, Ariawan Gunadi	PDF 44-69
<u>TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 29/PDT.G/2017/PN.TGL)</u> Adi Tri Atmaja, Gunawan Djajaputra	PDF 70-88
<u>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGHAPUSAN MEREK SECARA SEPIHAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)</u> Theresia Wijaya, Ariawan Gunadi	PDF 89-111
<u>POLEMIK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN YANG MENGATUR EKISTENSINYA</u> Brandon David, Diva Anastasya Suharto, Leslie Kwek	PDF 112-137
<u>ANALISIS TERHADAP INTEGRASI VERTIKAL DITINJAU DARI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 13/KPPU-I/2019)</u> Vanessa Widjaja, Ariawan Gunadi	PDF 138-163
<u>KEKUATAN HUKUM DARI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PERKARA KEPAILITAN</u> Alberta Alberta, Ariawan Gunadi	PDF 164-183
<u>ANALISIS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE APABILA ADANYA GUGATAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG</u> Darren Andreas, Ariawan Gunadi	PDF 184-203
<u>ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)</u> Maria Eleonora Novena Pritasari, Hery Firmansyah	PDF 204-225
<u>ANALISIS TERHADAP SYARAT KEPAILITAN PADA PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst)</u> André Kiemas, Ariawan Gunadi	PDF 226-245

OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

You are logged in as...

marisketampi

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

NOTIFICATIONS

- [View \(2 new\)](#)
- [Manage](#)

LANGUAGE

Select Language

English

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope
All

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

<u>PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKJELASAN INFORMASI MENGENAI LUAS APARTEMEN BOGOR VALLEY RESIDENCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 161/Pdt.G/2016/PN.Bgr).</u> Tahlia Tahlia, Jeane Neltje Saly	PDF 246-266
<u>ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG DITOLAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013</u> Ria Evarini Natalia, Ahmad Redi	PDF 267-286
<u>ANALISIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK</u> Raymond Kusuma, Ariawan Gunadi	PDF 287-310
<u>ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</u> Marselly Sealtiel, Hery Firmansyah	PDF 311-330
<u>KEPASTIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENOLAKAN MUTASI OLEH PEKERJA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 461 K/PDT.SUS-PHI/2017)</u> Vania Safira Putri, Ahmad Redi	PDF 331-352
<u>PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS DI PT. X TAHUN 2020)</u> Alifia Nashira, Hanafi Tanawijaya	PDF 353-375
<u>PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)</u> Natanine Natanine, Hery Firmansyah	PDF 376-400
<u>PEMBERATAN PIDANA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA ANAK DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP JUDEX JURIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 526K/PID.SUS/2019)</u> Virlieni Erika Putri, R Rahaditya	PDF 401-419
<u>TINJAUAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PT TOKOPEDIA SELAKU MARKETPLACE DALAM RANGKA MENYEDIAKAN SISTEM ELEKTRONIK YANG ANDAL DAN AMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</u> Samuel Evan, Christine S.T. Kansil	PDF 420-444
<u>PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) OLEH MEREK PUMADA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST.)</u> Olivia Laksmono, Christine S.T. Kansil	PDF 445-469
<u>PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM VERPONDING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR: 1401 K/Pdt/2018)</u> Geraldus Sulianto, Hanafi Tanawijaya	PDF 470-491
<u>TINJAUAN TERHADAP PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERLINDUNGAN BAGI PENERIMA HIBAH TERHADAP OBJEK HIBAH BAGI AHLI WARIS PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LARANTUKA NOMOR 7/PDT.G/2016/PN.LRT TANGGAL 15 MEI 2017)</u> Chelvia Priscilla, Gunawan Djajaputra	PDF 492-517
<u>PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERIMA MANFAAT ASURANSI PERTANGGUNGAN JIWA ATAS POLIS YANG DINYATAKAN LAPSE SECARA SEPIHAK PASCA DIAJUKAN KLAIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 628 PDT.G/2019/PN.JKT.BRT)</u> Ruth Yantiasni Leonita, Mariske Myeke Tampi	PDF 518-543
<u>Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) Tahun 2017)</u> Jessica Kandiawan, Christine S.T. Kansil	PDF 544-568
<u>EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU</u> Rosalinda Rosalinda, Tundjung Herning Sitabuana	PDF 569-592
<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KARTEL PRODUSEN KENDARAAN BERMOTOR YAMAHA-HONDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)</u> Wahyu Alisa Putri, Mariske Myeke Tampi	PDF 593-615
<u>PRAKTEK EKSEKUSI ASET PERUSAHAAN DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN</u>	PDF 616-636

<u>PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/ PN.NIAGA.SMG).</u> Chairul Maksus Syam, Stanislaus Atalim	
<u>ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA CV. BINTANG PRATAMA WIDYA TEKNIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 88/PDT.SUS-PHI/2020/PN BANDUNG).</u> Chevita Natalie Vania, Amad Sudiro	PDF 637-658
<u>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA WANITA SAKIT: CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR 74/PDT.SUS-PHI/2019/PN.BDG JO. PUTUSAN NOMOR 1016 K/PDT.SUS-PHI/2019).</u> Tamara Ratnasari, Sugandi Ishak	PDF 659 - 683
<u>DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 424/PID.SUS/2018/PN.AMB DAN PUTUSAN NOMOR: 494/PID.SUS/2018/PN.AMB).</u> Adithia warman, R Rahaditya	PDF 684-708
<u>EFEKTIVITAS PERGUB NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN, DAN PASAR RAKYAT DALAM RANGKA PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) GLODOK</u> Hansen Joneri, Mella Ismelina F.R.	PDF 709-732
<u>ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 629/PDT.SUS-HKI/2019).</u> Sarah Mawaddah Shabariyah, Christine S.T. Kansil	PDF 733-755
<u>PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH SISA AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL KUNCIRAN SERPONG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3049K/PDT/2018).</u> Yolanda Limarta, Hanafi Tanawijaya	PDF 756-776
<u>ANALISIS PENGAWASAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) DALAM MENGAWASI FENOMENA BARANG PALSU DI PLATFORM MARKETPLACE (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT).</u> Hessa Arteja, Christine S.T. Kansil	PDF 777-800
<u>PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP NASABAH ATAS RISIKO OPERASIONAL (CONTOH KASUS PADA PT BANK MANDIRI).</u> Sofwatun Nida, Jeane Neltje Saly	PDF 801-825
<u>PENUNJUKAN ANGGOTA POLRI AKTIF UNTUK MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM</u> Ronald Limanjaya, Tatang Ruchimat	PDF 826-845
<u>TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN HIBAH YANG DIBUAT ATAS DASAR PENYALAHGUNAAN KEADAAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 892 K/PDT/2017).</u> Joshua Tanaya, Gunawan Djajaputra	PDF 827-848
<u>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENOLAKAN MUTASI OLEH TENAGA KERJA YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1467 K/PDT.SUS-PHI/2017).</u> Jessica Condro, Sugandi Ishak	PDF 849-873
<u>PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PENGATURAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 92K/PDT.SUS-HKI/2017).</u> Vira Adryani, Christine S.T. Kansil	PDF 874-895
<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI OLEH PT SHOPEE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS: IBU MAYA DI TAHUN 2018).</u> Verren Andreas, Mariske Myeke Tampi	PDF 896-921
<u>TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE DAN MERCHANT TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR (CONTOH PUTUSAN NOMOR 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT).</u> Felicia Ade Putri, Jeane Neltje Saly	PDF 921-944
<u>ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP BARANG YANG TIDAK SAMPAI</u> Gabriel Gloria, Jeane Neltje Saly	PDF 944-966
<u>PERTANGGUNGJAWABAN MYANMAR ATAS TINDAKAN GENOSIDA TERHADAP KELOMPOK ETNIS ROHINGYA BERDASARKAN GENOCIDE CONVENTION 1948</u> Intan Ghina Maurizka, Ida Kurnia	PDF 967-991
<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT HARGA MASKER</u>	PDF

<u>YANG MELONJAK TINGGI DISAAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</u> Cornelia Dewi Anggarani, Mariske Myeke Tampi	992-1018
<u>URGENSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN HAND SANITIZER DI MASA WABAH COVID-19</u> Febriawan Mahendra, R Rahaditya	PDF 1019-1043
<u>AKIBAT HUKUM TIDAK DIBAYARKAN PREMI ASURANSI JIWA OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI (KASUS MOLLY SITUWANDA DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PANIN DAI-ICHI LIFE)</u> Kenneth Kenneth, Mella Ismelina F.R.	PDF 1044-1067
<u>ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MEREK TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA</u> Sabrina Aurellia, Christine S.T. Kansil	PDF 1068-1092
<u>AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PALSU ATAU DIPALSUKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 688 K/PID/2017)</u> Adit Wiratama, Sugandi Ishak	PDF 1093-1118
<u>UPAYA YURIDIS MEMPERKECIL DISPARITAS PUTUSAN</u> Kelly Kelly	PDF 1119-1137
<u>PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA ADI PURWANTO (BURUH) DAN PT. MUJUR TIMBER SIBOLGA "(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 178/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN.)</u> Revaldi Sanjaya, Stanislaus Atalim	PDF 1138-1163
<u>ANALISIS PENGEMBALIAN ASET TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 250K/PID.SUS/2018 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</u> Dennis Nathanael Lempoy, Firman Wijaya	PDF 1164-1185
<u>KEABSAHAN HIBAH TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)</u> Mia Sumiati, Endang Pandamdari	PDF 1186-1212
<u>TINJAUAN TENTANG PENOLAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS KEPULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA</u> Keivelyn Lovelycia, Tatang Ruchimat	PDF 1213-1238
<u>ANALISIS PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA MEMASUKI RUMAH ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 451/PID/2019/PT.DKI)</u> Nina Maulanny Herlan, R Rahaditya	PDF 1239-1259
<u>AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP DEVELOPER RUMAH SUSUN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA</u> Teddy Francis, Ariawan Gunadi	PDF 1260-1283
<u>ANALISIS KEWAJIBAN PENGAWASAN NEWS PORTAL TERHADAP KOMENTAR PUBLIK DI DALAM KOLOM KOMENTAR (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Di Uni Eropa)</u> Nisa Harashta, Christine S.T. Kansil	PDF 1284-1308
<u>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK</u> Sinthiarahma Felyna Megawati, Amad Sudiro	PDF 1309-1332
<u>TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PDT.G/2018/PN.MLG)</u> Tara Ulina Ginting, Amad Sudiro	PDF 1333-1352
<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA CREAM WAJAH DOKTER YANG TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PRODUK DI KEMASAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2008 K/PID.SUS/2016)</u> Sally Irawan, Jeane Neltje Saly	PDF 1353-1377
<u>KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 661/PID.B/2016/PN.BLB)</u> Ricky Vandre Teguh Jaya, R Rahaditya	PDF 1378-1399
<u>TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT)</u> Muhammad Gani Lukita, Ida Kurnia	PDF 1400-1423
<u>ANALISIS KONSEPSI ASAS FIRST TO FILE DALAM PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR (CONTOH KASUS: PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.</u>	PDF 1424-1445

<u>999 K/PDT.SUS-HKI/2019 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 15/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST).</u> Michelle Nathania, Ariawan Gunadi	
<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI TANGGAL KADALUWARSA PRODUK MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Putusan NO.149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)</u> Leviana Rachel, Amad Sudiro	PDF 1446-1468
<u>NEGOSIASI KONTRAK KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</u> Carissa Dianputri, Tundjung Herning Sitabuana	PDF 1469-1488
<u>PENYIMPANGAN TERHADAP PERJANJIAN HIBAH ANTARA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 723/PDT.G/2013/PN.DPS JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91 PK/PDT/2017).</u> Gladwin Lukman, Endang Pandamdari	PDF 1489-1513
<u>TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BAHAN MAKANAN KADALUWARSA DAN TIDAK MEMENUHI STANDAR YANG DITENTUKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)</u> Darren Marvel, Tundjung Herning Sitabuana	PDF 1514-1539
<u>ANALISIS TERHADAP BATASAN PEMBERLAKUAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN FORCE MAJEURE DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 591/PDT.G-LH/2015/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 540/PDT/2017/PT.DKI)</u> Nico Casey, Mella Ismelina F.R.	PDF 1540-1564
<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATIN HITAM SUNGAI MEDANG DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU (STUDI PUTUSAN NOMOR 113/PID.B/2019/PN.PLW)</u> Yunita Baransano, Hanafi Tanawijaya	PDF 1565-1587

Jurnal Hukum Adigama is indexed by:



Alamat:

Fakultas Hukum - Universitas Tarumanagara

Ruang Jurnal, Gedung M, Lantai 2, Kampus 1

Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat - 11440

[T] (+6221) 5671748, 5604477

[E] era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

E-ISSN 2655-7347

P-ISSN 2747-0873



Jurnal Hukum Adigama Stats



